



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS SOSIAL

RENCANA KERJA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025 dapat terselesaikan. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang diperlukan sebelum dilakukannya Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 adalah :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD

Renja Dinas Sosial merupakan penjabaran dari Renstra yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna, yang selanjutnya akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Sosial dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna telah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ranai, 5 Agustus 2024

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna



PURYANTI, SP., M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19750706 200003 2 008

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
	1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU.....	8
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....	14
	2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	16
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	17
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	17
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	18
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	18
	3.2 Tujuan dan Sasaran.....	23
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANAGKAT DAERAH.....	30
	4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	30
BAB V	PENUTUP.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna dan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022. Kemudian di ubah kembali berdasarkan Peraturan Bupati Natuna nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial;
- c. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Sosial;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.;

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Sosial merupakan penjabaran Renstra Dinas Sosial yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Dinas Sosial memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Sosial dalam satu tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Dinas Sosial Mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Dinas Sosial mencakup :

- 1) Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang pembentukan tim Penyusun Renja;
- 2) Orientasi mengenai Renja;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial meliputi:

- 1) Perumusan Rancangan Renja, dan
- 2) Penyajian Rancangan Renja.

Perumusan rancangan Renja Dinas Sosial mencakup :

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;
- c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
- e) Perumusan tujuan dan sasaran;
- f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

- g) Perumusan kegiatan prioritas;
- h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
- i) Penyempurnaan rancangan Renja;
- j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
- k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

3. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Dinas Sosial dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

4. Penetapan Renja SKPD

Pada tahap ini, rancangan Renja Dinas Sosial yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Renja Dinas Sosial memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Dinas Sosial, dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2020 - 2024. Renja Dinas Sosial selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah diutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna;
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna

- Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 66);
17. Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna
 18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;
 19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 361);
 20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2025 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Dinas Sosial ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas Sosial ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2025;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2025 sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2025, berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2025
- Bab V Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Dinas Sosial Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp.5.439.953.125,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.044.823.568,00 atau sebesar 92,74%.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023 dan capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Pemberdayaan Sosial

- 1) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

c. Program Rehabilitasi Sosial

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
 - Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

e. Program Penanganan Bencana

1) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten//Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial. Capaian Renstra secara umum telah berjalan dengan baik, dengan capaian pada seluruh kegiatan telah mencapai 100 persen, bahkan sebagian diantaranya telah melebihi target kinerja maupun anggaran yang direncanakan dalam Renstra.

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2025 yaitu perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2023 terlihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial pada Tahun 2022 dan 2023

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anjuran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah				
					K	RP	K	RP	K	RP Renja	K	RP DPA	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		K	RP	K	RP
					#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12			15=14/5x100			
1.06.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		4A																								Dinas Sosial	
1.06.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJP	NILAI	80.05	291,050,000	80.61	24,682,308	73.00	58,210,000	73.00	36,041,831	73.15	1,565,642	73.15	5,701,105	73.15	7,827,926	73.15	8,889,547	73.15	8,889,547	92.59	24.66	80.61	33,571,855	101	11.53	Dinas Sosial
1.06.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	291,050,000	100	24,682,308	100	58,210,000	100	36,041,831	100	1,565,642	100	5,701,105	100	7,827,926	100	8,889,547	100	8,889,547	100	24.66	100	33,571,855	100	11.53	Dinas Sosial
1.06.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IHHSR Reaksi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IHHSR Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IHHSR Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	291,050,000	2	24,682,308	2	58,210,000	2	36,041,831	2	1,565,642	2	5,701,105	2	7,827,926	2	8,889,547	2	8,889,547	100	24.66	4	33,571,855	33	11.53	Dinas Sosial
1.06.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Duluangan Administrasi Keselamatan yang Sesuai SOP	Persentase	90	21,448,546,000	0	2,668,766,933	85	4,166,306,288	85	4,140,831,552	100	760,822,724	100	1,843,508,737	100	2,978,315,629	100	2,978,315,629	100	2,978,315,629	117.65	71.93	100	5,647,082,562	111	26.33	Dinas Sosial
1.06.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu	1	15,199,100,000	1	2,668,766,933	1	3,039,820,888	1	3,032,639,875	1	664,266,869	1	1,510,699,242	1	1,971,825,126	1	2,978,315,629	1	2,978,315,629	100	98.21	2	5,647,082,562	200	37.15	Dinas Sosial
1.06.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	19	15,199,100,000	19	2,668,766,933	19	3,039,820,888	20	3,032,639,875	20	664,266,869	20	1,510,699,242	21	1,971,825,126	21	2,978,315,629	21	2,978,315,629	105	98.21	40	5,647,082,562	211	37.15	Dinas Sosial
1.06.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persentase	95	32,400,000	0	0	95	16,200,000	95	24,144,840	95	979,140	95	2,447,850	95	21,696,990	100	24,144,840	100	2,447,850	105.26	10.14	100	2,447,850	105	7.56	Dinas Sosial
1.06.01.2.05.02.		Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	54	32,400,000	0	0	27	16,200,000	31	24,144,840	0	979,140	29	2,447,850	29	21,696,990	0	24,144,840	29	2,447,850	94	10.14	29	2,447,850	54	7.56	Dinas Sosial
1.06.01.2.05.01.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	Persentase	27	210,000,000	0	0	11	30,000,000	11	25,100,000	0	10	10	24,581,744	10	24,581,744	10	24,581,744	10	24,581,744	90.91	97.94	10	24,581,744	37	11.71	Dinas Sosial
1.06.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	210,000,000	0	0	2	30,000,000	2	25,100,000	0	2	0	24,581,744	0	24,581,744	2	24,581,744	2	24,581,744	100	97.94	2	24,581,744	40	11.71	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	75	2,261,046,000	75	411,285,838	75	685,085,400	75	405,784,640	75	30,606,900	75	121,671,572	75	219,306,000	75	362,635,972	75	362,635,972	100	89.37	150	773,921,810	200	34.23	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	240,000,000	8	193,091,831	1	255,500,000	1	83,660,500	1	15,187,500	1	43,794,000	1	61,861,000	1	81,781,000	1	81,781,000	100.00	97.75	9	274,872,831	900	114.53	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	108,000,000	1	37,072,500	1	25,000,000	0	-	1	0	1	0	0	0	0	1	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	37,072,500	200	34.33	Dinas Sosial	
1.06.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	58,800,000	1	9,580,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	1,875,000	1	4,260,000	1	9,125,000	1	11,937,000	1	11,937,000	100	99.48	2	21,517,000	200	36.59	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	164,832,000	3	16,442,000	3	32,966,400	3	28,175,000	3	3,119,400	3	13,291,700	3	20,096,200	3	26,911,200	3	26,911,200	100	95.51	6	43,353,200	200	26.30	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	60,000,000	1	10,050,000	1	12,000,000	1	12,000,000	0	1	1	6,000,000	1	6,000,000	1	11,900,000	1	11,900,000	100	99.17	2	21,950,000	200	36.58	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	80,354,000	1	34,246,000	1	40,354,000	1	2,000,000	0	1	1	1,985,000	1	1,985,000	1	1,985,000	1	1,985,000	100	99.25	2	36,231,000	200	45.09	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.09.		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	28	1,429,060,000	60	110,803,507	28	307,265,000	28	267,998,140	12	10,425,000	8	52,340,872	16	118,148,800	39	223,311,772	75	223,311,772	26.786	83.34	135	334,115,279	482	23.38	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.10.		Penatausahaan Asp Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asp Dinamis pada SKPD	Dokumen	24	120,000,000	0	0	6	30,000,000	6	5,000,000	0	0	0	6	2,090,000	6	4,810,000	6	4,810,000	100	96.20	6	4,810,000	25	4.01	Dinas Sosial	

1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urus an Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangat Daerah	Persentase	70	2,200,000,000	80	414,186,000	50	75,000,000	55	279,065,285	49.66	3,569,500	49.66	8,923,750	60.18	62,638,250	60.18	251,857,650	60.18	251,857,650	109.42	90.25	140	666,043,650	200	30.27	Dinas Sosial	
1.06.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	875,000,000	1	414,186,000	1	75,000,000	1	46,064,750	0	3,569,500	0	8,923,750	1	42,056,250	0	46,625,750	1	45,625,750	100	99.05	2	459,811,750	200	52.55	Dinas Sosial	
1.06.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	45	675,000,000	0	0	10	175,000,000	3	36,000,000	0	0	0	0	0	696,000	7	25,195,950	7	25,195,950	233.33	69.99	7	25,195,950	16	3.73	Dinas Sosial	
1.06.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35	450,000,000	1	0	10	150,000,000	15	187,000,533	0	0	0	2	11,266,000	16	172,415,950	18	172,415,950	120	92.20	19	172,415,950	54	38.31	Dinas Sosial		
1.06.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	20	200,000,000	1	0	5	50,000,000	10	10,000,000	0	0	0	10	8,620,000	0	8,620,000	10	8,620,000	100	86.20	11	8,620,000	55	4.31	Dinas Sosial		
1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persentase	80	1,195,000,000	80	216,008,814	80	240,000,000	80	263,682,360	100	55,726,248	100	121,964,008	100	181,301,544	100	252,811,192	100	252,811,192	125	95.88	180	468,820,006	225	39.23	Dinas Sosial	
1.06.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	34,000,000	1	21,621,130	1	8,000,000	1	31,245,600	1	5,057,600	1	13,644,000	1	19,881,600	1	30,725,600	1	30,725,600	100	98.34	2	52,346,730	200	153.96	Dinas Sosial	
1.06.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	6,000,000	1	0	1	1,000,000	1	800,000	1	32,000	1	71,000	1	110,000	1	139,000	1	139,000	100	77.80	2	139,000	200	2.32	Dinas Sosial	
1.06.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,155,000,000	12	194,387,684	12	231,000,000	12	231,936,760	3	50,636,648	3	108,249,008	3	161,309,944	3	221,946,592	12	221,946,592	100	95.69	24	416,334,276	200	36.05	Dinas Sosial	
1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urus an Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persentase	75	351,000,000	75	34,668,131	70	80,200,000	75	110,414,552	75	5,674,067	75	77,802,315	75	90,441,197	75	-	100	-	150	-	-	150	34,668,131	200	9.88	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perbaikannya	Unit	2	121,000,000	2	22,768,131	2	242,000,000	2	51,414,552	2	5,274,067	2	23,518,515	2	34,307,397	3	49,226,161	3	49,226,161	150	95.74	5	71,994,292	250	59.50	Dinas Sosial	
1.06.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	24,000,000	3	5,950,000	5	6,000,000	4	9,000,000	3	400,000	3	4,800,000	3	6,650,000	5	8,000,000	5	8,000,000	125	88.89	8	13,950,000	27	58.13	Dinas Sosial	
1.06.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	30	206,000,000	3	5,950,000	5	50,000,000	4	50,000,000	3	0	3	49,483,800	0	49,483,800	0	49,483,800	3	49,483,800	75	98.97	6	55,433,800	20	26.91	Dinas Sosial	
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan	Persentase	50	1,856,847,000	40	90,159,671	50	350,000,000	50	100,076,500	50	2,259,852	50	60,874,692	50	74,709,544	50	80,359,174	50	80,359,174	100	80.30	90	170,518,845	180	9.18	Dinas Sosial	
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang diembangkan	PSKS	6	1,856,847,000	5	90,159,671	5	350,000,000	5	100,076,500	6	2,259,852	6	60,874,692	6	74,709,544	6	80,359,174	6	80,359,174	120	80.30	11	170,518,845	183	9.18	Dinas Sosial	
1.06.02.2.03.01.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	550,000,000	30	87,940,671	40	150,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	30	87,940,671	60	15.99	Dinas Sosial		
1.06.02.2.03.02.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	1,056,847,000	0	0	16	150,000,000	16	98,435,000	0	2,259,852	17	59,239,192	0	73,074,044	0	78,723,674	17	78,723,674	106.3	79.98	17	78,723,674	34	7.45	Dinas Sosial	
1.06.02.2.03.05.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan	Sertifikat	1	250,000,000	0	2,219,000	1	50,000,000	1	1,641,500	0	0	0	1,635,500	0	1,635,500	0	1,635,500	0	1,635,500	0	99.63	0	3,854,500	0	1.54	Dinas Sosial	

1.06.04.		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Pantii Sosial	Persentase	100	185,000,000	100	524,415,871	100	185,000,000	100	550,263,191	100	11,998,050	100	113,294,108	100	341,100,892	100	441,142,614	100	441,142,614	100	80.17	200	965,598,485	200	521.92	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosia	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Pantii Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	100	185,000,000	100	524,415,871	100	185,000,000	100	550,263,191	100	11,998,050	100	113,294,108	100	341,100,892	100	441,142,614	100	441,142,614	100	80.17	200	965,598,485	200	521.92	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.03.		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Berupa Sesiul kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	50,000,000	21	363,288,002	30	50,000,000	30	230,800,931	0	11,998,050	0	40,065,316	76	175,674,216	76	209,074,800	76	209,074,800	253.3	90.99	97	572,362,802	323	1,144.73	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.11.		Pemberian Pelayanan Penekzurun Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penekzurun Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	85,000,000	0	20,399,014	5	85,000,000	5	60,712,360	0	0	1	0	1	12,651,107	0	22,993,014	1	22,993,014	20.0	37.87	1	43,392,028	20	51.05	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.12.		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	50,000,000	0	140,728,855	5	50,000,000	5	25,874,930	0	0	5	73,228,792	0	152,775,569	0	209,074,800	5	209,074,800	100	80.80	5	345,803,635	100	699.61	Dinas Sosial
1.06.05.		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL bagi PPKS	Persentase Perindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Persentase	59.74	1,055,000,000	89.25	2,032,435,400	60.49	135,000,000	60.09	326,533,777	86.57	51,061,338	89.57	96,284,670	89.45	144,598,558	87.18	304,442,570	87.18	304,442,570	145.08	93.23	176	2,336,877,970	295	221.51	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.		Pengelolaan Data Fakir Miskin Calapan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Desa/ Kelurahan yang Aktif Mengupdate Data Terpadu	Persentase	84.41	1,055,000,000	54.55	2,032,435,400	59.74	135,000,000	59.74	326,533,777	54.55	51,061,338	54.55	96,284,670	100	144,598,558	100	304,442,570	100	304,442,570	167.39	93.23	155	2,336,877,970	183	221.51	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.03.		Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	KPM	2675	605,000,000	9,641	2,032,435,400	2675	85,000,000	2675	277,533,777	4,194	51,061,338	4,310	96,284,670	4,166	139,803,558	4,093	256,847,570	4,093	256,847,570	4,093	92.55	13,734	2,289,282,970	513	378.39	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.04.		Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	450,000,000	0	0	1	50,000,000	0	49,000,000	0	0	0	0	0	4,795,000	20	47,595,000	20	47,595,000	20	97.13	20	47,595,000	40	10.58	Dinas Sosial
1.06.06.		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi	Persentase	100	250,000,000	100	63,344,961	100	50,000,000	100	97,601,064	100	11,137,615	100	73,164,525	100	49,072,480	100	64,876,566	100	64,876,566	100	66.47	200	128,221,527	200	51.29	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase	100	250,000,000	100	63,344,961	100	50,000,000	100	97,601,064	100	11,137,615	100	38,027,836	100	49,072,480	100	64,876,566	100	64,876,566	100	66.47	200	128,221,527	200	51.29	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.01.		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggapi Darurat (Pangangan) Kewenangan	Orang	0	250,000,000	3,116	63,344,961	0	50,000,000	0	97,601,064	1,875	11,137,615	1	38,027,836	0	49,072,480	2,018	64,876,566	2,018	64,876,566	100	66.47	5,134	128,221,527	100	51.29	Dinas Sosial
1.06.06.2.02.		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana	Kampung	1	400,000,000	0	0	1	50,000,000	1	164,665,210	1	2,992,822	1	35,136,689	1	51,699,511	1	136,089,651	1	136,089,651	100	82.68	1	136,089,651	100	34.02	Dinas Sosial
1.06.06.2.02.02.		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang mengikuti Sosialisasi	Orang	17	400,000,000	0	17	50,000,000	17	164,665,210	0	2,992,822	0	35,136,689	17	51,699,511	17	136,089,651	17	136,089,651	100	82.68	17	136,089,651	100	34.02	Dinas Sosial	
1.06.07.		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	Persentase	100	310,000,000	100	17,520,136	100	20,000,000	100	19,000,000	100	2,454,342	100	2,929,341	100	14,677,527	100	17,651,192	100	17,651,192	100	92.90	200	35,171,328	200	11.35	Dinas Sosial
1.06.07.2.01.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Persentase	100	310,000,000	100	17,520,136	100	20,000,000	100	19,000,000	100	2,454,342	100	2,929,341	100	14,677,527	100	17,651,192	100	17,651,192	100	92.90	200	35,171,328	200	11.35	Dinas Sosial
1.06.07.2.01.02.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam	Makam	11	310,000,000	11	17,520,136	11	20,000,000	11	19,000,000	11	2,454,342	11	2,929,341	11	14,677,527	11	17,651,192	11	17,651,192	100	92.90	22	35,171,328	200	11.35	Dinas Sosial

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Sosial pada tahun 2023 secara keseluruhan relatif baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 6 indikator program yang ditargetkan dalam Renja tahun 2023, semuanya telah tercapai sesuai dengan target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja pada urusan sosial tergolong baik.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Akhir Rensta (2026)	Target dan Realisasi Kinerja Renstra Tahun ke - 1 (2022)			Target dan Realisasi Kinerja Renstra Tahun ke - 2 (2023)		
					Target Kinerja Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 (%)	Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023(%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	78.28	80.05	78.80	80.61	102.30	79.00	73.15	92.59
	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	Persen	80	90	80	80	100	85	100	117.65
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	50	50	50	50	100	50	50	100
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gepeng diluar panti sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Persen	50.95	59.74	60.49	89.25	147.55	60.09	80.17	133.42
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
---	---	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
 - Masih tingginya masalah sosial masyarakat yang belum tertangani
 - Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan menjadi permasalahan sosial didaerah dan nasional
 - Banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tetapi cakupannya penanganannya masih rendah
 - Terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan dalam upaya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Natuna yang berbentuk kepulauan
 - Belum optimalnya pemberdayaan PSKS.
- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
 - Adanya perubahan kebijakan dari tingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah
 - Kurangnya sinkronisasi regulasi yang ada baik antara Kementerian Sosial, OPD terkait dan regulasi daerah
 - Kurangnya SDM dan personil yang menangani permasalahan sosial secara khusus

- c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:
- Adanya dukungan Program dan Anggaran baik dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendorong program percepatan pengentasan kemiskinan di daerah khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya.
 - Kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam hal perlindungan dan jaminan sosial
 - Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan dasar

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagai berikut :

- Masih tingginya masalah kesejahteraan sosial
- Belum optimalnya pemberdayaan PSKS
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung PPKS

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun 2023, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Visi Misi Presiden 2020–2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005–2025. RPJMN 2020–2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang diwujudkan ke dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan tahun 2025 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ;

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry,

kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah,
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan Karakter Bangsa;

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
- 2) Memajukan kebudayaan;
- 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
- 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga dan
- 5) Meningkatkan budaya literasi

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien dan
- 5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup,

serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi dan
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Isu strategis nasional yang akan ditangani untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2025, antara lain meliputi:

- a. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Kesehatan dan Pendidikan;
- c. penanggulangan Pengangguran yang disertai Decon Job;
- d. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;
- e. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan dalam Rangka Mendorong Produktivitas.
- f. Ekonomi Hijau.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025: **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, maka fokus pembangunan diarahkan: *Pertama*: SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa. *Kedua*: Insfrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan insfrastruktur konektivitas, penegembangan transisi energi, percepatan insfrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah. *Ketiga*: Ekonomi insklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,3–5,6 persen;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5–5 persen;
3. Tingkat Kemiskinan 7–8 persen;
4. Rasio Gini 0,379–0,382;
5. Indeks Modal Manusia 0,56;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 38,6 persen;
7. Nilai Tukar Petani 113-115;
8. Nilai Tukar Nelayan 104-100.

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sehingga penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema **“Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan”**. Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah Optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya dan pembangunan insfrastruktur wilayah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Natuna mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam urusan bidang sosial yang mengarah pada pencapaian prioritas pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan. Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Dinas Sosial merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan

pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Misi 2 : Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Misi 6 : Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP

Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
---	-------------------------	----------------------------------	----------------------------

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2025
Dinas Sosial Kabupaten Natuna

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Indikator Sasaran 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2025
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	51,22	Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	50
					Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Diluar Panti Sosial	Persen	100
					Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Persen	59,73
					Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100
					Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlwan yang Dikelola	Persen	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Indikator Sasaran 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2025
Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	79,85	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	79,85
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,49	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	Nilai	90

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada Urusan Sosial yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026,
- b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Sosial Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026.

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025 tertuang dalam Tabel berikut ini (Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026).

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KAB. NATUNA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKTIK CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKTIK MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DIKAS SOSIAL						7.878.629.388,00							7.878.629.388,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.878.629.388,00							7.878.629.388,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						7.878.629.388,00							7.878.629.388,00	
5.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Misi Layanan LSPF	-			79,25 Misi	4.581.951.489,00						-	4.581.951.489,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penetapan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Person	58.216.000,00						-	58.216.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja OPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja OPD				2 Laporan	58.216.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		58.216.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	3.836.820.900,00						-	3.836.820.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Tajil dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Mendapat Tajil dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	3.836.820.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.836.820.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkemampuan Persentase Keahlian Pegawai	-			22 Person 95 Person	81.700.000,00						-	81.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Akibat Kelengkapan														
			Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Akibat Kelengkapan				01 Paket	21.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum pemerintahan	-			75 Person	489.231.400,00						-	489.231.400,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENSTRA OPD TAHUN 2023	PRAKTIKUM CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKTIKUM BILA RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.06.0002		Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	48.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		48.000.000,00	DNAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0003		Penyediaan Fasilitas Kamar Tangga	Jumlah Paket Fasilitas Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DNAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	DNAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	32.000.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.000.400,00	DNAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	DNAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	DNAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	307.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		307.200.000,00	DNAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0010		Penyediaan Aspek Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyediaan Aspek Dinamis pada SKPD				6 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DNAS SOSIAL
1.06.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Perusahan Unsur Pemertahan Daerah	Persentase pengalihan barang milik pemerintah daerah				65 Persen	543.500.000,00			-	-	-		543.500.000,00	DNAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / RENCANA URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REGISTRASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKARAAH CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARAAH MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAU/INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAU/INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Nabua, Semau Kecamatan, Semau Kuli Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.96.01.2.87.0005		Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Dibekalkan				3 Unit	174.500.000,00	Kab. Nabua, Semau Kecamatan, Semau Kuli Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		174.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.96.01.2.87.0006		Pengadaan Perabotan dan Meubel Lainnya														
			Jumlah Unit Perabotan dan Meubel Lainnya yang Dibekalkan				27 Unit	190.000.000,00	Kab. Nabua, Semau Kecamatan, Semau Kuli Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		190.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.96.01.2.87.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibekalkan				1 Unit	90.000.000,00	Kab. Nabua, Semau Kecamatan, Semau Kuli Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.96.01.2.88		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	-			75 Persen	230.000.000,00			-	-	-		230.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.96.01.2.88.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Nabua, Semau Kecamatan, Semau Kuli Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.96.01.2.88.0002		Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibekalkan				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Nabua, Semau Kecamatan, Semau Kuli Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.96.01.2.88.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	231.000.000,00	Kab. Nabua, Semau Kecamatan, Semau Kuli Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		231.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.96.01.2.89		Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
			Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan	-			75 Persen	114.700.000,00			-	-	-		130.300.000,00	DINAS SOSIAL
1.96.01.2.89.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya				3 Unit	24.200.000,00	Kab. Nabua, Semau Kecamatan, Semau Kuli Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.200.000,00	DINAS SOSIAL
1.96.01.2.89.0006		Pemeliharaan Perabotan dan Meubel Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	TANGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN REJENIA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TANGET REJENIA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN BALU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PEMANANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU BERSIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU BERSIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki				3 Unit	6.000.000,00	Kab. Nakuha, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.00.0000			Perawatan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi				1 Unit	34.500.000,00	Kab. Nakuha, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.00.0011			Perawatan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Pembekuan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Peralatan Pembekuan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi				0 Unit	0,000.000,00	Kab. Nakuha, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pendanaan Sosial	-			80 Persen	402.183.000,00							402.183.000,00	
	1.06.02.2.00	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	-			8 PSKS	402.183.000,00							402.183.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.00.0001			Peningkatan Kemampuan Potensi Pelaku Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pelaku Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota				45 Orang	150.000.000,00	Kab. Nakuha, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.00.0002			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kecamatan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitas Kecamatan Kabupaten/Kota				17 Orang	153.183.000,00	Kab. Nakuha, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		153.183.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.00.0004			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan Kecamatan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kecamatan Kabupaten/Kota				2 Lembaga	90.000.000,00	Kab. Nakuha, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.00.0005			Peningkatan Kemampuan Potensi Daya Manusia dan Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LKK) Kecamatan Kecamatan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sorstikal yang di hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LKK) Kecamatan Kabupaten/Kota				1 Sorstikal	90.000.000,00	Kab. Nakuha, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RESTUKTURISASI OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN BAJU RENCANA TAHUN 2024		PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.88.84	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penderita Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Penderita Miskin peror	-			168 Penderita	758.896.660,00						-	758.896.660,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penderita Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Penderita di Luar Panti Sosial	Persentase Penderita Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GELANDANG Panti Sosial yang mendapat Kebijakan Dukungnya	-			130 Penderita	750.000.000,00						-	750.000.000,00	DAERAH SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Pemukiman														
			Jumlah Orang yang mendapatkan Pemukiman Kebijakan Pemukiman Sosial dengan Standar GDI Minimal Keseluruhan Kabupaten/Kota				20 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DAERAH SOSIAL
	1.88.84.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Paket dan Aksesibilitas Lainnya yang Tersebut dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	30.000.000,00	Kab. Natarua, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DAERAH SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peningkat Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	150.000.000,00	Kab. Natarua, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DAERAH SOSIAL
	1.88.84.2.01.0006	Pendanaan Bimbingan Fisiik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	120.000.000,00	Kab. Natarua, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	DAERAH SOSIAL
	1.88.84.2.01.0008	Pendanaan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penderita Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Penderita dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penderita Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Penderita dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	80.000.000,00	Kab. Natarua, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DAERAH SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Pendanaan Pelayanan Pemukiman Keluarga														
			Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Pemukiman Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	180.000.000,00	Kab. Natarua, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		180.000.000,00	DAERAH SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKARAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGKA PERDIANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU BERKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.06.04.2.01.0012	Pendidikan Layanan rujukan					5 Orang	220.000.000,00	Kab. Nalanda, Demas Kecamatan, Demas Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perolehan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	-			26,72 Persen	606.294.000,00						-	606.294.000,00	
	1.06.05.2.00	Pengkajian Data Fakti Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		-			-	606.294.000,00						-	606.294.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pengkajian Fakti Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakti Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Diteliti				38654 Orang	156.294.000,00	Kab. Nalanda, Demas Kecamatan, Demas Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		156.294.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengkajian Data Fakti Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengkajian Fakti Miskin Kabupaten/Kota				4152 Keluarga	106.000.000,00	Kab. Nalanda, Demas Kecamatan, Demas Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		106.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Kabupaten/Kota				4152 Keluarga	106.000.000,00	Kab. Nalanda, Demas Kecamatan, Demas Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		106.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitas Bantuan Pengembrogen Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota				50 Orang	206.000.000,00	Kab. Nalanda, Demas Kecamatan, Demas Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		206.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PEMANGGARAN BENCANA	Persentase Kebutuhan Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi/Rebutuhan Dasar/nya	-			180 Persen	375.000.000,00						-	375.000.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perolehan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	-			100 Persen	300.000.000,00						-	300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penyelesaian Sri Hari dalam Masa Tanggapi Darurat (Penggolongan) Kecamatan Kabupaten/Kota				10 Orang	50.000.000,00	Kab. Nalanda, Demas Kecamatan, Demas Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE BERSIHA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKTIK CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KEMERIA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SARAFAN	PRAKTIK BALU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DARI PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2023	PAJU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAJU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggapan Darurat (Pangulangan) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	50.000.000,00	Kab. Natuna, Sema Kecamatan, Sema Kai/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI (LMBM)	-	-	-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0004		Peningkatan Akses bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Peningkatan Akses bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	50.000.000,00	Kab. Natuna, Sema Kecamatan, Sema Kai/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI (LMBM)	-	-	-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.06.2.01.0009		Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	50.000.000,00	Kab. Natuna, Sema Kecamatan, Sema Kai/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI (LMBM)	-	-	-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.06.2.02		Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Keterampilan Berusaha Kabupaten/Kota					1 Desa	175.000.000,00						175.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.06.2.02.0001		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	75.000.000,00	Kab. Natuna, Sema Kecamatan, Sema Kai/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI (LMBM)	-	-	-	75.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.06.2.03.0002		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Orang	100.000.000,00	Kab. Natuna, Sema Kecamatan, Sema Kai/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI (LMBM)	-	-	-	100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
E. 1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					100 Pesisir	350.000.000,00						350.000.000,00		
1.06.07.2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					100 Pesisir	350.000.000,00						350.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.07.2.01.0001		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dukungan Medis Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dukungan	250.000.000,00	Kab. Natuna, Sema Kecamatan, Sema Kai/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI (LMBM)	-	-	-	250.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.07.2.01.0002		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RUMAH OPD TAHUN 2023	PRAKTIK CAPAIAN TARGET RUMAH OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK BASARAN	PRAKTIK MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAU/ INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAU/ INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Melek yang Terespon Persekitarannya pada Teras Melek Poblesan Kabupaten Kota				11 Melek	100.000.000,00	Kab. Nalca, Desah Racumban, Desah KariDasa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
J U M L A H								7.812.639.300,00							7.876.129.300,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan urusan sosial yang bermanfaat guna mendukung pencapaian Visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pejabat struktural di Dinas Sosial agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2025 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2025.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Sosial melaksanakan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Dinas Sosial Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan sosial diharapkan akan lebih

terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan sosial. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2025 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.